



KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

SURAT KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI Nomor : 07/04/KI.Bali/VIII/2017

- Menimbang** : 1. Bahwa Keterbukaan merupakan salah satu ciri negara demokrasi.
2. Bahwa Keterbukaan dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
3. Bahwa masyarakat punya hak untuk tahu dan terlibat dalam perencanaan dan penilaian dalam setiap keputusan dan atau kebijakan yang ditetapkan dan diputuskan oleh Badan Publik dalam tata kelola pemerintahan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Komisi Informasi
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Bali Tanggal 2 Agustus 2017 Tentang Penilaian Pemeringkatan Badan Publik.

Memutuskan

- Menetapkan** : 1. Penilaian terhadap Badan Publik c.q Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
2. Pemeringkatan terhadap penilaian hasil dari Monitoring dan Evaluasi terhadap Badan Publik c.q seperti tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
3. Hasil penilaian dan pemeringkatan merupakan informasi terbuka dan diumumkan kepada publik.
4. Hasil Akhir Penilaian dan pemeringkatan terhadap Badan Publik terkait dengan implementasi Keterbukaan Informasi ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.



KEPUTUSAN
KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI
Nomor : 07/04/KI.Bali/VIII/2017

Tentang
Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik
dan
Pemeringkatan Badan Publik Hasil Penilaian Monitoring dan Evaluasi Badan Publik di
Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota se-Bali Tahun 2017

I. Kategori Badan Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi,
Kabupaten dan Kota

No.	BADAN PUBLIK	REKAPITULASI	KETERANGAN
1.	PPID Kota Denpasar	97,0	Peringkat I
2.	PPID Kabupaten Jembrana	92,0	Peringkat II
3.	PPID Kabupaten Bangli	91,5	Peringkat III
4.	PPID Kabupaten Karangasem	90,0	
5.	PPID Kabupaten Gianyar	88,0	
6.	PPID Kabupaten Buleleng	86,0	
7.	PPID Provinsi Bali	85,0	
8.	PPID Kabupaten Klungkung	84,0	
9.	PPID Kabupaten Tabanan	80,0	
10.	PPID Kabupaten Badung	55,0	Peringkat paling rendah

II. Kategori Badan Publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi,
Kabupaten dan Kota

No.	BADAN PUBLIK	REKAPITULASI	KETERANGAN
1.	PPID Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	96,0	Peringkat I
2.	PPID Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng	90,0	Peringkat II
3.	PPID Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem	85,0	Peringkat III

III. Kategori Badan Publik Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota

No.	BADAN PUBLIK	REKAPITULASI	KETERANGAN
1.	PPID Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar	95,0	Peringkat I
2.	PPID Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung	91,0	Peringkat II
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng	85,0	Peringkat III

IV. Kategori Badan Publik Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten dan Kota

No.	BADAN PUBLIK	REKAPITULASI	KETERANGAN
1.	PPID Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Denpasar	94,0	Peringkat I
2.	PPID Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Klungkung	90,0	Peringkat II
3.	PPID Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem	85,0	Peringkat III

Denpasar, 3 Agustus 2017
Komisi Informasi Provinsi Bali
Ketua,



I Gede Agus Astapa, S.Sos., MM

Lampiran Badan Publik Peserta Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Nomor : 07/04/KI.Bali/VIII/2017

Tanggal : 3 Agustus 2017

1. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali
2. Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bali
3. Perusahaan Daerah Provinsi Bali
4. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar
5. RSUD Kota Denpasar
6. BPBD Kota Denpasar
7. PDAM Kota Denpasar
8. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung
9. RSUD Kabupaten Badung
10. BPBD Kab. Badung
11. PDAM Kab. Badung
12. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan
13. RSUD Kabupaten Tabanan
14. BPBD Kab. Tabanan
15. PDAM Kab. Tabanan
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar
17. RSUD Kabupaten Gianyar.
18. BPBD Kab. Gianyar
19. PDAM Kab. Gianyar
20. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung
21. RSUD Kabupaten Klungkung
22. BPBD Kab. Klungkung
23. PDAM Kab. Klungkung
24. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem
25. RSUD Kabupaten Karangasem
26. BPBD Kab. Karangasem
27. PDAM Kab. Karangasem
28. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli
29. RSUD Kabupaten Bangli
30. BPBD Kab. Bangli
31. PDAM Kab. Bangli
32. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng
33. Diskominfo Kabupaten Buleleng
34. RSUD Kabupaten Buleleng
35. BPBD Kab. Buleleng
36. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana
37. RSUD Kabupaten Jembrana
38. BPBD Kab. Jembrana
39. PDAM Kab. Jembrana

Komisi Informasi Provinsi Bali
Ketua,



I Gede Agus Astapa, S.Sos., MM

Catatan Atas Pelaksanaan Monev KIP 2017:

1. Monev tahun 2017 sasarannya yaitu dinas yang menyentuh pelayanan langsung masyarakat.
2. Yang menjadi kepala dinas BPBD Provinsi Bali tahun 2017 adalah Dewa Indra (sekda sekarang)
3. RSUD Wangaya saat simulasi temuan bagusya adalah ngecek jumlah orang sakit dan kamar kosong, ngecek kursi dan ngecek layanan bisa dilihat.
4. RSU Badung saat simulasi temuan bagusya adalah aksesnya mudah dan simulasi lancar, dan ngecek kamar kosong bisa dilihat.